

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH DI KOTA SURAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

KHOLIS MUSTAMAR HAKIM
B 200 050 102

**FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah memberikan proses pemberdayaan dan kemampuan suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun dan mengatasi masalah ekonomi masing-masing daerah yang ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat sendiri dalam pembangunan daerahnya. Menurut Suparmoko (2003:16), tujuan kebijakan desentralisasi adalah:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Peranan pemerintah sendiri diantaranya adalah menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan secara eksplisit bahwa unit pemerintahan yang melaksanakan otonomi di daerah adalah di tingkat kabupaten atau kota. Secara umum, beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan.
2. Pelaksanaan otonomi daerah menggunakan tata cara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan demikian peran daerah sangat menentukan.
3. Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan pada hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.
4. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu pembagian sistem keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab.
5. Fungsi pemerintah pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan strategis (moneter, pertahanan, luar negeri dan hukum) maupun untuk mengatasi ketimpangan antar daerah.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berisi kebijakan perimbangan keuangan, diantaranya:

1. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diemban juga akan bertambah banyak. Adanya kewenangan dalam rangka otonomi daerah tersebut menuntut kesiapan Pemerintah Daerah sendiri dalam pelaksanaannya karena semakin bertambah pula urusan yang ditanganinya. Menurut Halim (dalam A.A.N.B. Dwirandra, 2007:2) ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Anggaran menurut GASB (*Governmental Accounting Standards Board*) (dalam Bastian, 2006:164) berarti rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan

untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan. Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pengukuran kinerja pada Pemerintah Daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam mengelola keuangan daerah dapat digunakan alat pengukuran kinerja berupa analisis rasio keuangan APBD terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu apakah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **"ANALISIS KINERJA ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SURAKARTA"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
2. Apakah anggaran keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan secara efektif dan efisien?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat sistem pengukuran kinerja ada dua alat ukur yaitu alat ukur finansial (keuangan) dan non finansial (non keuangan) maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai alat ukur kinerja finansial dengan menggunakan data APBD yang berbasis kinerja tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2007.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta apakah sudah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan sesuai dengan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah.
2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, dapat mengetahui posisi keuangan dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan otonomi daerahnya.
3. Dapat dijadikan landasan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini diantaranya terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metoda penelitian, analisis data dan pembahasan, dan penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang menguraikan secara teoritis tentang akuntabilitas dan akuntansi pemerintah, kinerja organisasi publik, otonomi daerah, tinjauan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengukuran kinerja anggaran keuangan

daerah, analisis rasio keuangan APBD, serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan yang mengemukakan tentang gambaran umum Kota Surakarta, sejarah perkembangan pemerintahan Kota Surakarta, Struktur organisasi Pemerintah Kota Surakarta dan hasil analisis data serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran peneliti yang diharapkan berguna bagi Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait.